



## KABUPATEN MOJOKERTO

Nomor : 700/492.44/416-034/2025  
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas  
Kinerja Instansi (AKIP) Tahun 2025

Mojokerto, 15 September 2025

Kepada

Yth. Direktur UOBK RSUD Prof. dr. Soekandar  
Kabupaten Mojokerto

di

Mojokerto

Dengan ini kami sampaikan hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto, dengan uraian sebagai berikut :

### 1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara khusus Evaluasi AKIP bertujuan untuk :

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup Evaluasi AKIP meliputi penilaian atas keberadaan, kualitas, dan pemanfaatan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Evaluasi AKIP mulai tahun 2025 dilaksanakan melalui aplikasi Penilaian Mandiri Internal (PMI) Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Mojokerto Nomor 069.5/4301/416-034/2025 tanggal 11 Agustus 2025. Langkah ini dilakukan agar penilaian evaluasi AKIP terintegrasi, terdokumentasi lebih baik, lebih transparan, akuntabel dan objektif, sehingga mendapatkan hasil evaluasi yang lebih berkualitas. Selain adanya evaluasi berbasis elektronik juga didukung Tim Evaluasi AKIP kolaborasi dari Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi pada komponen evaluasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Mojokerto Nomor 188.45/244 /HK/416-012/2025.

## 2. Komponen dan Penilaian Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

- a. Perencanaan Kinerja;
- b. Pengukuran Kinerja;
- c. Pelaporan Kinerja;
- d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan “kategori peringkat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	<b>AA</b>	<b>&gt; 90 – 100</b>	<b>Sangat Memuaskan</b> Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif dan efisien ( <i>reform</i> ). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2.	<b>A</b>	<b>&gt; 80 – 90</b>	<b>Memuaskan</b> Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/ Pengawas/ Subkoordinator.
3.	<b>BB</b>	<b>&gt; 70 – 80</b>	<b>Sangat Baik</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran

No.	Kategori	Nilai	Interpretasi
			kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/ Koordinator.
4.	<b>B</b>	<b>&gt; 60 – 70</b>	<b>Baik</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/ unit kerja.
5.	<b>CC</b>	<b>&gt; 50 – 60</b>	<b>Cukup (Memadai)</b> Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6.	<b>C</b>	<b>&gt; 30-50</b>	<b>Kurang</b> Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	<b>D</b>	<b>&gt;0 – 30</b>	<b>Sangat Kurang</b> Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

### 3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas pelaksanaan AKIP RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto tahun 2025 menunjukkan nilai sebesar **85,55** dengan predikat **A (Memuaskan)**.

Pencapaian predikat **A (Memuaskan)**, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dievaluasi pada RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto, dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut :

Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2024	Nilai Hasil Evaluasi Tahun 2025
a. Perencanaan Kinerja	30,00	23,40	25,83
b. Pengukuran Kinerja	30,00	27,00	27,16
c. Pelaporan Kinerja	15,00	13,95	12,94
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	21,00	19,62
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>85,35</b>	<b>85,55</b>

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

#### **a. Perencanaan Kinerja**

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas ketersediaan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja, dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja yang meliputi keselarasan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dengan kinerja yang ingin dicapai. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja menunjukkan nilai sebesar **25,83** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- 1) Perencanaan sudah dilaksanakan dengan cukup baik, mohon untuk menjaga konsistensi dan keselarasan dengan dokumen perencanaan di internal maupun dengan dokumen perencanaan yang ada di Dinas Kesehatan

#### **b. Pengukuran Kinerja**

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian keberadaan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi keandalan pengukuran kinerja, kesesuaian data kinerja yang dibutuhkan dalam mengukur capaian kinerja, pemanfaatan teknologi dalam pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan pengukuran kinerja dalam penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **27.16** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- 1) Pengukuran sudah dilaksanakan dengan cukup baik, mohon untuk menjaga konsistensi dan keselarasan dengan dokumen perencanaan di internal maupaun dengan dokumen perencanaan yang ada di Dinas Kesehatan

#### **c. Pelaporan Kinerja**

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,94** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh sebagai berikut :

- 1) Perjanjian Kinerja tahun berjalan belum dilakukan monev berkala

- 2) Laporan kinerja belum dilaporkan tepat waktu
- 3) Laporan kinerja sudah dipublikasi
- 4) LK belum menjadi kepedulian semua pegawai, dilihat belum adanya Monev IKI berkala ditahun berjalan
- 5) Masih terdapat kinerja pegawai /SKP yang tidak linier dengan IKI yang ditetapkan

#### **d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi internal perangkat daerah secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai serta upaya pemanfaatan hasil tindak lanjut evaluasi sebelumnya.

Hasil evaluasi atas komponen evaluasi kinerja internal menunjukkan nilai sebesar **19,62** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tersebut sebagai berikut :

- 1) Sebagian output indikator kinerja program tahun 2024 tidak tercapai (nilai SAKIP);
- 2) Seluruh rekomendasi Inspektorat telah ditindaklanjuti namun tidak ada uraian pemanfaatan atas rekomendasi sakip dalam rangka peningkatan kinerja pada bab III LKjIP;
- 3) Seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti namun tidak seluruhnya target IKU tercapai antara lain : LOS, TOI, CRR;
- 4) Penetapan sebagian target IKU belum lebih baik dari target tahun sebelumnya dan belum seluruhnya tercapai 100%.

#### **4. Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang **direkomendasikan** kepada Tim AKIP UOBK RSUD Prof DR Soekandar Kabupaten Mojokerto untuk ditindaklanjuti sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja
  - a. Menjaga kualitas dokumen perencanaan, dan selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait proses perencanaan
  - b. Menjaga keselarasan antar dokumen perencanaan
2. Pengukuran Kinerja
  - a. Meningkatkan kualitas proses penilaian dan evaluasi kinerja di tingkat UOBK RSUD Prod DR. Soekandar

### 3. Pelaporan Kinerja

- a. Melakukan monev Perjanjian Kinerja yang ditetapkan tahun berjalan secara berkala minimal per TW
- b. Kedepan agar melaporkan Laporan kinerja yang telah ditetapkan kepala PD tepat waktu sebelum bulan Maret ke Kementerian PANRB, Kepala Daerah melalui aplikasi yang telah disediakan dan mempublikasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada masyarakat.
- c. Melakukan Monev IKI berkala ditahun berjalan
- d. Kedepan memastikan seluruh pegawai menyusun SKP yang linier dengan IKI yang ditetapkan, sehingga terdapat kesinambungan kinerja pimpinan instansi dengan kinerja pegawai sesuai jenjang.

### 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Kedepannya melaksanakan upaya perbaikan kinerja PD berdasarkan rekomendasi evaluasi AKIP sehingga terdapat kenaikan kinerja PD dari tahun sebelumnya, dapat dilakukan dengan melaksanakan evaluasi capaian target kinerja secara triwulanan;
- b. Kedepannya dalam menyusun LKJIP menganalisis secara mendalam faktor keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian target kinerja sampai level sub kegiatan. Serta mengaitkan upaya perbaikan kinerja PD dengan rekomendasi evaluasi AKIP sehingga terdapat kenaikan kinerja PD dari tahun sebelumnya;
- c. Kedepannya melaksanakan upaya perbaikan kinerja PD berdasarkan rekomendasi evaluasi AKIP sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi kinerja PD;
- d. Kedepannya menetapkan target kinerja yang menantang dan lebih baik dari tahun sebelumnya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas AKIP RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto. Kami minta agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan upaya yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

a.n. Bupati Mojokerto  
Sekretaris Daerah,



Tembusan:

1. Bapak Bupati
2. Tim Evaluasi SAKIP